**PERAN PENGAWAS DALAM PEMBINAAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PADA SMK NEGERI DI KOTA PALU**

**(Roles of Supervisors in Developing Entrepreneurship Program at Public Vocational Secondary Schools in Palu City)**

**Junaidi**1

Universitas Negeri Makassar

[junaidi.manda@yahoo.co.id](mailto:junaidi.manda@yahoo.co.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pembinaan pengawas dalam program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian adalah pengawas SMK, sedangkan informannya meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, pengurus unit produksi, dan kepala bengkel.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui mengorganisasikan data, kondensasi data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas atau derajat kepercacayaan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan program kewirausahaan yang dilakukan oleh pengawas SMK belum maksimal terutama pada aspek perencanaan/penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, sedangkan program kewirausahaan yang ada di sekolah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hambatan-hambatannya yaitu masalah dana dan pemasaran dalam menjalankan kegiatan program kewirausahaan di sekolah.

Kata Kunci: Pembinaan Program Kewirausahaan

**ABSTRACT**

The study aims at examining supervisor development activity in entrepreneurship program at SMKN (Public Vocational Secondery School) in Palu city. The study is a qualitative research with the supervisor of SMK as the subjects of the research; whereas, School supervisor informant, the informant were the principal, vice-principal of public affairs departement, production unit committee, and head of workshop.

Data were collected by employing interview, observation, and documentation. Data analysis technique used was qualitative analysis through data organization, data condense, and data verification/ conclusion drawing. Data validity was conducted through credibility or trust degree to prove whether the observed by writer was based on the fact.

The results of the study reveal that the entrepreneurship program development activity conducted by SMK supervisors has not maximal yet, particularly on the aspects of planning/arrangement, implementation, evaluation; whereas, the entrepreneurship program in school has run well although there are several constraints such as funding and marketing problems in conducting the program.

**Keywords:** *entrepreneurship program development*

**Pendahuluan**

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan setiap warga negara, sebab dengan pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan daya saing di era perdagangan bebas dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, dinyatakan bahwa ”Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menyadari pentingnya proses peningkatan mutu pendidikan, pemerintah bersama kalangan yang peduli terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia, terus berupaya mewujudkan usaha peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas dengan menerbitkan suatu peraturan yang menjadi pedoman untuk mewujudkan terciptanya pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan yang selalu berkembang.

Hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain soal mutu, pemetaan, relevansi dan efektivitas penyelenggaraan. Persoalan mutu, mungkin menempati prioritas utama. Mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan meningkatkan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara formal aspek pengawas, kepala sekolah dan pendidik mempunyai peran penting dalam mewujudkannya, disamping aspek lainnya seperti sarana dan prasarana, kurikulum, siswa, manajemen, dan pengadaan buku. Ketiga aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kompetensi profesional dari ketiganya merupakan satu komponen yang sangat berperan yaitu meningkatkan kompetensi profesional yang bersangkutan yang bercirikan: menguasai tugas, peran dan kompetensinya, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya, dan menganut paradigma belajar bukan saja di kelas tetapi juga bagi dirinya sendiri melakukan pendidikan berkelanjutan sepanjang masa.

Peningkatan mutu pendidikan nasional dalam arti dan lingkup yang seluas-luasnya merupakan titik berat pembangunan di bidang pendidikan. Dalam upaya mewujudkan mutu yang setinggi-tingginya, pemerintah dan masyarakat yang berada dalam jajaran pendaya guna dan pengguna sumber daya pendidikan tak hentinya mengadakan pembenahan terhadap dimensi-dimensi penentu kemajuan pendidikan. Sesungguhnya paradigma baru pendidikan nasional, memang telah menempatkan pendidik sebagai tenaga profesional, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 Ayat 2 UU Sisdiknas).

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain perbaikan kurikulum, proses belajar mengajar, kinerja guru, kinerja sekolah, sistem pendidikan, supervisi kepala sekolah, pemberdayaan kelompok kerja guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta upaya-upaya lainnya. Dalam upaya-upaya tersebut, upaya perbaikan kinerja sekolah termasuk upaya yang sangat strategis, mengingat sekolah sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pencapaian sekolah sesuai standar nasional pendidikan (Fathurohman, 2011:6).

Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah ditetapkannya Standard Nasional Pendidikan (SNP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, SNP merupakan kriteria minimal mutu pendidikan nasional, sehingga harus menjadi rujukan bagi setiap satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungannya. Ada delapan standar nasional pendidikan yakni: (a) standar kompetensi lulusan, (b) standar isi, (c) standar proses, (d) standar penilaian pendidikan, (e) standar pengelolaan pendidikan, (f) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (g) standar sarana dan prasarana, serta (h) standar pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan empat standar yang disebutkan pertama lebih banyak menjadi tanggung jawab guru, sedangkan empat standar berikutnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dengan demikian pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan di lingkungan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan pendidik pada setiap SMA dan SMK termasuk MA dan MAK dan paket C dengan arahan dan pembinaan dari pengawas sekolah.

Diantara delapan standar yang ada dan memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Keberadaan pengawas sebagai salah satu tenaga kependidikan sesungguhnya telah mendapatkan pengakuan sejak lama. Kedudukan lembaga ini sekarang semakin penting, terutama sejak dikeluarkannya PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Sebab kelompok profesi ini bersama-sama pihak lain dalam mengawal agar penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah dan akan ditetapkan kemudian oleh pihak yang berwenang.

Dalam realitasnya, peran pengawas untuk melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan belum dapat berlangsung secara optimal. Permasalahan ini, bukan hanya menjadi kritikan pihak eksternal, sehingga bahkan muncul wacana untuk menghapuskan keberadaan atau menggabungkan fuingsinya ke dalam lembaga lain, seperti Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota, tetapi juga dikeluhkan oleh pihak internal pengawas sendiri.

Berkaitan dengan belum optimalnya peran pengawas, berbagai kendala lain yang cukup krusial adalah terjadinya perbedaan kompetensi pengawas antar individu, antar satuan pendidikan, antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kabupaten kota. Problematika lain yang dihadapi adalah rendahnya akses pengawas untuk meningkatkan kompetensinya, termasuk akses untuk mendapatkan informasi mutakhir untuk mengembangkan profesi dan kariernya.

Kondisi rendahnya kompetensi dan lebarnya disparitas kompetensi pengawas, tuntutan stakeholders justru semakin tinggi. Tidak heran jika muncul kasus pengawas yang ”gagap” menempatkan dirinya, akibat dari jenjang pendidikan pengawas yang lebih rendah daripada kepala sekolah/guru atau kepala sekolah/guru lebih ”terlatih (sering mengikuti pelatihan)” daripada pengawasnya.

Melihat besarnya peran pengawas sekolah berdasarkan peraturan yang menyatakan kedudukannya, tugas dan dan wewenangnya, pengawas adalah mitra sejajar dari guru, kepala sekolah dan dapat berfungsi sebagai mediator dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Propinsi. Melihat sasaran supervisi manajerialnya khususnya berkaitan dengan pembinaan program kewirausahaan pada SMK, pengawas sekolah lebih mengetahui kinerja kepala sekolah binaannya, manajemen sekolah dan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan di sekolah.

Pengawas sekolah perlu memiliki sifat kepemimpinan atau kecakapan memandu agar sekolah binaan yang dipandu dapat berjalan baik dan lancar. Kelancaran jalannya pendidikan itu dapat dicapai dengan baik berkat adanya kegembiraan bekerja dalam kehidupan sebuah sekolah. Pengawas sekolah harus memiliki kesanggupan atau kecakapan selaku pengembang atau pemandu pendidikan dalam mewujudkan pendayagunaan setiap personil secara tepat dan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil dan pencapaian tujuan dalam sekolah tersebut. Sebagai pengembang pendidikan pengawas sekolah mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dan yang lebih utama lagi berkaitan dengan pembinaan program kewirausahaan agar supaya sekolah yang dibinanya lebih mandiri, kreatif, inovatif dalam pengembangan sekolah dimasa yang akan datang.

Kondisi riil atau gambaran umum pengawas sekolah yang ada di Kota Palu adalah sebagai berikut: pengawas berasal dari kepala sekolah yang bermasalah atau akan berakhir masa jabatannya sebagai kepala sekolah, sekretaris dinas pendidikan Kota Palu yang tinggal beberapa bulan lagi memasuki purnabakti dimutasi menjadi pengawas sekolah, proses seleksi pengawas sekolah dari guru-guru yang berkeinginan menjadi pengawas sekolah di Kota Palu, dan ditunjuk langsung untuk menjadi pengawas sekolah oleh kepala dinas atau pejabat lainnya yang ada di lingkungan Kota Palu tanpa melalui proses seleksi, walaupun saatnya akan diseleksi. Hal ini berarti bahwa dalam rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak/belum mempertimbangkan aspek kompetensi dan prestasi calon pengawas, tetapi lebih cenderung dipengaruhi oleh muatan politik. Hal ini berakibat kepada kemampuan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan supervisi manajerial dan akademik terhadap sekolah binaannya masih jauh dari yang di harapkan. Ditinjau dari segi kualifikasi pendidikan pengawas sekolah dilingkup Kota Palu khususnya pengawas sekolah SMK data yang di peroleh pengawas sekolah SMK di Kota Palu berjumlah 7 orang, 1 orang memasuki masa purnabakti di tahun 20016, 1 orang kualifikasi pendidikan terakhirnya Doktor dalam bidang Agama Islam, berarti tidak linear dengan pendidikan S1 (strata satu) dan S2 (strata dua). 3 orang berkualifikasi magister non pendidikan S2, dan 2 orang berkualifikasi sarjana. (sumber: koordinator pengawas Propinsi Sulawesi Tengah). Hal ini berarti bahwa kualifikasi pendidikan pengawas yang ada belum cukup untuk menjamin kompetensi pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam supervisi manajerial yang bersentuhan langsung dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kegiatan. Yang lebih memprihatikan lagi, bahwa hasil uji kompetensi pengawas sekolah tahun 2015 untuk jenjang SMK di Kota Palu mempunyai nilai rata-rata per dimensi yaitu: Dimensi Evaluasi Pendidikan 35,09, Dimensi Penelitian dan Pengembangan 34,96, Dimensi Supervisi Akademik 30,00, dan Dimensi Supervisi Manajerial 30,00 (Sumber LPMP Propinsi Sulawesi Tengah).

Hasil diskusi dengan beberapa guru SMK Negeri di Kota Palu mengungkapkan bahwa intensitas kehadiran pengawas sekolah melakukan pembinaan di sekolah masih sangat kurang, menurut Nana Sudjana (2012:1-3) Pada saat pengawas sekolah tidak memahami posisi dan peran strategisnya secara benar maka dimungkinkan ada beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya adalah (1) ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan; (2) institusi ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (kasarnya: pejabat rongsokan). (3) pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. (4) tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota). (5) frekuensi kehadiran pengawas dirasakan sangat kurang; (6) fungsi kehadiran pengawas sehingga cenderung hanya menemui kepala sekolah dan tidak mendampingi atau memfasilitasi pendidik/tenaga kependidikan; (7) guru merasakan ketidakadaannya pengawas terhadap kesulitan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga peserta didik kurang mendapatkan pelayanan belajar yang baik dari gurunya.

Hal ini juga diperkuat dengan buku kerja pengawas sekolah mengenai beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@60 menit) dalam1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Beban kerja pengawas sekolah untuk mencapai 37,5 jam per minggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian tentang peran pengawas dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu harus dilakukan demi untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

**Tinjauan Pustaka**

Dunia pendidikan pada ranah sekolah, mutu pendidikan merupakan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu proses pembelajaran memiliki hubungan kasual dengan mutu hasil. Jika proses  pembelajaran bermutu, tentulah standar kompetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula. Dalam pencapaian mutu pendidikan, sekolah membutuhkan keberadaan pengawas sekolah.

Pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001)  dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan  eksistensi pengawas sekolah.

Peran pengawas dalam melakukan pembinaan program adalah suatu proses untuk membantu, mendorong, dan memotivasi tenaga pendidik untuk merancang suatu program kewirausahaan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan sebagai program pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja kelas menengah yang siap bekerja di masyarakat. Oleh karena itu program pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran dengan konsep *learning by doing.* Adapun pembinaan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan/sekolah.

Pengawas sekolah/madrasah sebagai guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada sekolah/madrasah. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah.

Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas diperlukan kemampuan-kemampuan dasar dalam melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan untuk mengembangkan program-program yang ada di sekolah terutama pada sekolah menengah kejuruan yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Oleh sebab itu, kompetensi pengawas perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara bekelanjutan sehingga kinerja pengawas akan terus meningkat. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu kinerja sekolah/madrasah yang dibinanya.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang didukung dengan fakta-fakta empirik, akurat dan lengkap serta memperoleh keterangan-keterangan yang mendalam tentang peran pengawas dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu, dengan menggunakan data dari hasil wawancara seluruh informan dalam penelitian ini, data hasil observasi, dan dokumentasi diharapkan nantinya dapat mengungkap apa yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pembinaannya.

**Hasil Penelitian**

Data hasil penelitian yang di peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi ruang kerja pengawas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah. Kemudian melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pengawas sekolah terkait dengan pembinaan program kewirausahaan. Peneliti melakukan pembicaraan dengan pengawas sekolah mengenai jadwal kunjungan ke SMK Negeri 3 Palu dan SMK Negeri 5 Palu sehingga dapat terpantau atau dilihat kegiatan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang berkaitan dengan program kewirausahaan yang ada di sekolah.

Hasil wawancara diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, pengurus unit produksi, kepala bengkel di SMK Negeri 3 Palu dan SMK Negeri 5 Palu dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah berkaitan dengan program kewirausahaan yang ada di sekolah.

Adapun hasil studi dokumentasi yang didapatkan peneliti untuk memperkuat dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara adalah teks hasil wawancara yang diubah dari rekaman suara informan, dokumentasi photo saat penelitian, dan dokumen-dokumen seperti program kerja kepala sekolah, program kerja wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, program kerja pengurus unit produksi, dan program kerja kepala bengkel di SMK Negeri 3 Palu dan SMK Negeri 5 Palu. Hasil penelitian tentang peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu dijabarkan sebagai berikut:

* + - * 1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek perencanaan.**

Berdasarkan hasil penelitian pengawas sekolah belum memiliki dan menyusun perencanaan pembinaan terhadap program kewirausahaan, walaupun telah menyampaikan secara lisan bahwa akan membuat perencanaan program pembinaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen program kerja kepengawasan yang tidak dimiliki oleh pengawas sekolah. Selain itu pengawas sekolah hanya fokus pada supervisi administrasi pembelajaran dengan melihat program perencanaan yang dibuat oleh guru.

* + - * 1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek pelaksanaan.**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah belum melaksanakan pembinaan terhadap program kewirausahaan. Pengawas sekolah baru sebatas menanyakan jenis program kewirausahaan di masing-masing jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK. Pelaksanaan pembinaan pengawas sekolah lebih banyak pada pemantauan, pengamatan, dan saran untuk penguatan program pengembangan kewirausahaan. Menurut Aedi (2014) pengawas sekolah mempunyai peranan yang ganda yaitu selain pengawasan dan pemantauan juga sebagai pembimbing atau pembina dalam seluruh kegiatan di sekolah. Oleh karena itu pengawas sekolah haruslah melaksanakan secara baik dan maksimal seluruh program kepengawasan, sebagaimana dimensi kompetensi supervisi manajerial yaitu membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan.

* + - * 1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek evaluasi.**

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengawas sekolah belum melakukan evaluasi terhadap program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu. Pengawas sekolah hanya menanyakan tentang produk yang dihasilkan oleh program kewirausahaan dan sekaligus menyampaikan saran, bahwa produk dari program kewirausahaan harus sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Pada aspek evaluasi, pengawas sekolah hanya sebatas melihat program yang telah dibuat oleh pengelola dan melihat produk hasil dari program kewirausahaan. Pentingnya evaluasi yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudjana. dkk (2013) bahwa tujuan hasil pengawasan adalah untuk mengetahui kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, kesesuaian antara program pengawasan dengan pelaksanaannya, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pengawasan, serta masalah-masalah yang belum terselesaikan melalui kegiatan pengawasan.

**Pembahasan**

Peran pengawas dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada dimensi peran pengawas dalam pembinaan terdiri dari perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan, dan evaluasi program pembinaan.

1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek perencanaan.**

Berdasarkan hasil penelitian pengawas sekolah belum memiliki dan menyusun perencanaan pembinaan terhadap program kewirausahaan, walaupun telah menyampaikan secara lisan bahwa akan membuat perencanaan program pembinaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen program kerja kepengawasan yang tidak dimiliki oleh pengawas sekolah. Selain itu pengawas sekolah hanya fokus pada supervisi administrasi pembelajaran dengan melihat program perencanaan yang dibuat oleh guru. Pengawas sekolah pada SMK semestinya memiliki program pembinaan terhadap program kewirausahaan sebagaimana yang termaktub dalam salah satu dimensi kompetensi pengawas sekolah yaitu kompetensi supervisi manajerial. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang kompetensi pengawas sekolah. Selain itu menurut Sudjana (2013) bahwa program pengawasan pada hakekatnya adalah rencana pengawasan yang dibuat sebelum pengawasan dilakukan.

Seorang pengawas sekolah memiliki seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya bertujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara baik dan terarah, tetapi juga memberikan masukan, pembinaan, bimbingan, dan bantuan kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas di sekolahnya (Agung. 2013). Pentingnya rencana program kepengawasan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010, Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya Pasal 5 disebutkan tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Namun demikian penyusunan program kewirausahaan telah dibuat oleh guru-guru kejuruan, seperti: program tahunan, program semester, Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdapat pembuatan produk atau desain produk untuk dipraktekkan secara langsung oleh siswa.

1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek pelaksanaan.**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah belum melaksanakan pembinaan terhadap program kewirausahaan. Pengawas sekolah baru sebatas menanyakan jenis program kewirausahaan di masing-masing jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK. Pelaksanaan pembinaan pengawas sekolah lebih banyak pada pemantauan, pengamatan, dan saran untuk penguatan program pengembangan kewirausahaan.

1. **Peran pengawas sekolah dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada aspek evaluasi.**

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengawas sekolah belum melakukan evaluasi pembinaan terhadap program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu. Pengawas sekolah hanya menanyakan tentang produk apa yang dihasilkan oleh program kewirausahaan dan sekaligus menyampaikan saran, bahwa produk dari program kewirausahaan harus sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Evaluasi pelaksanaan program pembinaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program dengan pelaksanaannya. Mengevaluasi hasil pembinaan program kewirausahaan di sekolah tidak terlaksana, karena pemahaman pengawas tentang program kewirausahaan belum maksimal, sehingga yang dilakukan oleh pengawas adalah mengevaluasi jadwal penggunaan bengkel, struktur bengkel, dan peralatan yang digunakan di bengkel.

Peran pengawas dalam pembinaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu pada dimensi program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu terdiri dari inovasi program kewirausahaan, kemampuan bekerja keras personil program kewirausahaan, motivasi personil kewirausahaan, sikap pantang menyerah personil program kewirausahaan, kemampuan mencari solusi terbaik, dan naluri/minat minat kewirausahaan kepala sekolah.

**1. Inovasi program kewirausahaan**

Inovasi program kewirausahaan yang dilakukan oleh pengawas sebatas penyampaian saja, akan tetapi mengajukan inovasi program tidak ada, dan yang dilakukan oleh pengawas adalah supervisi akademik saja. Kemudian inovasi program kewirausahaan yang dilakukan oleh guru-guru sudah berjalan dengan baik sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah. Mengutip pendapat Suryana (2003:1) mengemukakan bahwa; “kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses”. Sejalan dengan pendapat Susilaningsih (2015:8) menyatakan;

“pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi berkaitan dengan membangun karakter wirausaha, pola pikir wirausaha, dan perilaku wirausaha yang selalu kreatif dan inovatif, menciptakan nilai tambah atau nilai-nilai baik, memamfaatkan peluang dan berani mengambil resiko”.

Schumpeter mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang berhubungan dengan kegiatan creative destruction (Schumpeter, 1934 dalam de Klerk & Kruger, 2002), karena wirausaha secara terus menerus mengembangkan metode yang ada dan produk-produk lama melalui pengenalan inovasi-inovasi baru (Morris, Lewis & Sexton, 1994).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa inovasi dan kreatif harus dimiliki oleh pengelola program kewirausahaan yang ada di sekolah, demi untuk kemajuan dan pengembangan sekolah dimasa yang akan datang khususnya berkaitan dengan program kewirausahaan. Selanjutnya proses inovasi tersebut dapat menghasilkan peluang-peluang baru di mana peluang tersebut diciptakan menggunakan kombinasi-kombinasi yang tidak umum, yang tidak lazim (*unusual combinations*) sehingga mampu menghasilkan produk, baik *tangible* maupun *intangible*, yang unik, berbeda dari yang sudah ada, dan sesuai dengan kebutuhan produk.

* + - 1. **Kemampuan bekerja keras pengelola program kewirausahaan**

Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target [kerja](http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-kerja-cerdas.html) tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. [Kerja keras](http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-kerja-keras.html) dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.

kerja keras yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengelola dapat menumbuhkan etos kerja yang kuat (keras) atau tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan, untuk mencapai keberhasilan sebuah program yang efektif, pengelola harus bekerja keras menjadikan berjalan secara efektif. Sehingga berdasarkan teori yang mengatakan bahwa sekolah akan menjadi organisasi pembelajaran yang efektif apabila adanya kerja keras dari kepala sekolah serta usaha yang sama oleh setiap komponen sekolah untuk memajukan sekolah tersebut akan menjadi nyata apabila prinsip tersebut benar-benar terintegrasi dengan baik.

Kemampuan bekerja keras pengelola program kewirausahaan yang ada di setiap sekolah telah terbukti dengan adanya kekompakan guru-guru dalam membina siswa, membuat desain-desain terbaru sehingga dapat menghasilkan suatu produk kemudian dilakukan pemasaran/penjualan melalui pameran, sehingga dana yang didapatkan dari hasil penjualan dimamfaatkan untuk kebutuhan sekolah itu sendiri.

* + - 1. **Motivasi pengelola program kewirausahaan**

Motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Motivasi merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Motivasi dapat dicermati dari ketegangan yang dialami oleh individu, semakin besar ketegangan, semakin tinggi tingkat upaya yang ditunjukkan individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2005)

Pengawas mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan mendorong sekolah-sekolah mempunyai program kewirausahaan berjalan dengan baik, namun ada juga pengawas mempunyai keengganan mengembangkan program kewirausahaan karena tidak diketahui darimana harus memulai, sehingga motivasi untuk mengembangkan program kewirausahaan yang ada di sekolah ada pada guru-guru.

**4. Sikap pantang menyerah pengelola program kewirausahaan**

Pengelola program kewirausahaan yang ada disetiap sekolah mempunyai sikap pantang menyerah dan semangat untuk berinovasi dalam mengembangkan program kewirausahaan, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipamerkan.

Selain itu Benson (2014: 63) menggambarkan strategi seorang pemimpin dalam mengelola program sebagai berikut:

*Strategic leadership has been identified as a source of competitive advantage (Day, 2000). Hitt and Ireland (2005) defined strategic leaders in terms of the manager’s “ability to anticipate, envision, maintain flexibility, think strategically, and work with others to initiate changes that will create a viable future for the organization.*

Penggambaran tersebut dapat dimaknai bahwa pemimpin strategis dalam hal kemampuan "manajer untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir strategis, dan bekerja sama. Yang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi organisasi

**5. Kemampuan mencari solusi terbaik**

Kemampuan mencari solusi terbaik pengelola program kewirausahaan yang ada di sekolah yaitu dapat bekerja sama dengan pihak luar untuk memasarkan hasil produk, membuat desain baru dan dapat memperbaiki mesin yang sudah rusak, walaupun kedatangan pengawas hanya melihat administrasi pembelajaran saja. Sejalan dengan hal itu Zimmere (1996:51) mengemukakan; *creativity is the ability to develop new ideas and to discover new ways of looking at problem and opportunities*. Sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang.

**6. Naluri/minat kewirausahaan kepala sekolah**

Naluri/minat personil kewirausahaan yang ada di sekolah telah terbukti yaitu dengan adanya hasil produk/karya siswa, sehingga dari hasil produk tersebut dapat dipamerkan di setiap hari-hari besar nasional, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut dapat di mamfaatkan untuk pembelian bahan, peralatan, dan juga diberikan untuk guru dan siswa yang terlibat dalam program kewirausahaan.

Sejalan dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi kewirausahaan, menuntut kepala sekolah untuk mampu berinovasi, bekerja keras, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan selalu memiliki naluri kewirausahaan dalam pengelolaan kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Sehingga kepala sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi kewirausahaan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan di SMK.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu.**

Dalam pelaksanaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya: keinginan siswa untuk belajar, peralatan yang ada di sekolah cukup memadai, buku-buku tentang pengoperasaian peralatan ada, tenaga pendidik yang bisa diandalkan kemampuannya. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan program kewirausahaan meliputi: belum adanya keseriusan didalam menangani program kewirausahaan, dihilangkanya dana komite sehingga tidak dapat membeli bahan dan peralatan, pemasaran hasil produk belum maksimal dan dukungan dari pemerintah daerah masih kurang.Sejalan dengan pendapat Zef Risal, dkk (2011:7) bahwa; “secara bersama-sama modal, pemasaran dan manajemen dapat mempengaruhi pengembangan suatu usaha”.

**Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan program kewirausahaan pada SMK Negeri di Kota Palu terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya: keinginan siswa untuk belajar, peralatan yang ada di sekolah cukup memadai, buku-buku tentang pengoperasaian peralatan ada, tenaga pendidik yang bisa diandalkan kemampuannya. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan program kewirausahaan meliputi: belum adanya keseriusan didalam menangani program kewirausahaan, dihilangkanya dana komite sehingga tidak dapat membeli bahan dan peralatan, pemasaran hasil produk belum maksimal dan dukungan dari pemerintah daerah masih kurang.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, maka disarankan hal-hal berikut: (i) Bagi pengawas sekolah hendaknya menyusun pelaksanaan pembinaan program kewirausahaan, sehingga guru-guru termotivasi untuk mengembangkan program kewirausahaan yang sudah ada di sekolah terutama masalah pemasaran hasil karya/produk yang dibuat oleh siswa. (ii) Bagi guru hendaknya bersikap terbuka kepada pengawas yang melakukan supervisi terhadapnya, segala kendala atau kesulitan dalam proses pembelajaran didiskusikan dengan pengawas untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapinya. (iii) Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perekrutan pengawas sekolah agar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi birokrasi Nomor 21 tahun 2010.

**Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Dr.H.Rusyadi, M.Pd. dan Prof. Dr. Ruslan, M.Pd selaku pembimbing. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd.,Prof. Dr.Suradi Tahmir, MS yang banyak memberikan masukan demi penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kerjasamanya dalam memberikan program beasiswa S2, Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Jasruddin, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana UNM, Prof. Dr. Anshari, M.Hum., selaku Asisten Direktur I Program Pascasarjana UNM, Prof. Dr. H. Hamsu Abd. Gani, M.Pd., selaku Asisten Direktur II Program Pascasarjana UNM, Prof. Dr. Suradi Tahmir, M.S., selaku Asisten Direktur III Program Pascasarjana UNM, dan Prof. Dr. Ruslan, M.Pd selaku Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana UNM, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidkan di PPs UNM. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah Subhana Wata’ala. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa PPs UNM Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Kepengawasan 2015 yang telah memberikan dorongan moril selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Selesainya artikel ini tidak lepas dari doa dan dorongan keluarga. Untuk itu tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang H. Manda Pallu dan Hj. Asni Kulasse, Saudariku Sitti Zaenab, Istri tercinta Aisyah Mutmainnah Paturusi, S.T.,M.Pd. serta anak-anakku Abidurrahman, Ammar Ashshiddiq dan Aqilah Naziha yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan doa selama perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini. Akhirnya penulis mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin!!!

**Daftar Pustaka**

Aedi, N, 2014. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek,* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Agung I. 2013, *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.* Jakarta: PT. Bestari Buana Murni.

Arasti, Z . 2012. A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate Student*, International Journal Higher Education Studies.* Vol.2 No.1; March 2012

Benson Muteti Katulwa, 2014. Developing Global Leadership Competencies through Kenyan MBA Programs *The International Journal Of Business & Management* (ISSN 2321 – 8916) Vol 2 Issue 7.www.theijbm.com.(diakses 17 Agustus 2017)

Direktorat Pendidikan Menengah Keiuruan. (2005).*Kebijakan Pendidikan MenengahKejuruan 2005-2009.*Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah DepertemenPendidikanNasional.

Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan. (2007).Program SMK 2007.Jakarta: Depdiknas. Direktorat Pembinaan SMK. (2007). *Panduan pelaksanaan th 2007, imbal swadaya smk model.* Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Friday O. Okpara, 2007. *Journal Of Asia Entrepreneurship and Sustainability No reproduction or storage, in part or in full, permitted without prior permission.* Volume III, Issue 2, September 2007. (diakses 17 Agustus 2017)

Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. *Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan Nasional ini disusun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Tahun 2009/2010.* Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan

Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang  *petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas*

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998 Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaruan.

Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang *petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya*

Kompri, 2015. Manajemen Pendidikan –jilid 3. Penerbit Alfabeta*,* Bandung

Kurniawan, Wawan. 2014. Peran Pengawas Sekolah dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut ertanian Bogor.

Moleong, L.J, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Miles, Mathew B & Hubermen A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta

Muid, F. 2003. Standar Pelayanan Pendidikan. Jakarta: Badan Diklat Depdagri & Badan Diklat Depdiknas

Pandong, A. 2003. Jabatan Fungsional Pengawas. Jakarta: Badan Diklat Depdagri & Badan Diklat Depdiknas

Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan Di Pendidikan Tinggi (*The Implementation Of Entrepreneurship Education In The Higher Education*) Siswo Wiratno Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan e-mail: [wiratno2002@yahoo.com](mailto:wiratno2002@yahoo.com) diterima tanggal:1/10/2012, dikembalikan untuk revisi: 2/11/2012, disetujui tanggal: 28/11/2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .Jakarta: Depdikbud

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 *Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelengaraan Pendidikan.* Jakarta:Depdikbud

Priansa, Donni Juni & Somad, R. 2014. *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah.* Penerbit Alfabeta, Bandung

Program Pascasarjana UNM. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*: PPs UNM.

Pusat Pengembangan tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah. Kementrian Pendidikan Nasional.

Risal Z, dkk, 2011. Makro Jurnal & Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Madura, *Makro Jurnal & Kewirausahaan*, Volume 2 No 12\Nov 2011.

Ruswanti E, 2016. Entrepreneurial Leadership of Vocational Schools Principals in Indonesia, *International Journal of Economic and Management*. 10(S1): 167 – 181 (2016)

Sahertian P.A. 2000, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan.* Jakart: Penerbit Rineka Cipta.

Sudjana N.H. 2011, *Supervisi Pendidikan Konsep dan Aplikasinya Bagi Pengawas Sekolah.* Penerbit Binamitra.

Sudjana N. 2012, Pengawas dan Kepengawasan: *Memahami Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan Tanggung Jawab Sekolah.* Bekasi: Binamitra Publishing.

Suhardan, D. 2014. Supervisi Provesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah. Bandung: Alphabeta.

Surat Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya

Susilaningsih, 2015. Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Pentingkah Untuk Semua Profesi?, *Jurnal Economia*, Volume 11, Nomor 1, April 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.